

ANALISIS INFORMASI KEUANGAN DALAM MENGEVALUASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Ivo Maelina Silitonga¹, Septony B Siahaan², Sahala Purba³

^{1,2,3}Universitas Methodist Indonesia, Indonesia

E-mail: imsilitonga.im@gmail.com¹, valen250315@gmail.com², sahala824@gmail.com³

^{*3}Corresponding author

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah ditinjau dari berapa antara lain: Skala Otonomi Keuangan Daerah, Besaran Desentralisasi Fiskal, Efektivitas PAD, Efisiensi PAD, Efektivitas Fiskal Daerah, Efisiensi Fiskal Daerah dan Besaran Kontribusi BUMD. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian informasi keuangan daerah Kabupaten Langkat tahun 2013-2020, pengumpulan data pengumpulan yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis skala keuangan. Hasil penelitian menunjukkan Skala Otonomi Keuangan masih sangat rendah dengan nilai rata-rata 7,48%, Kemandirian Keuangan Daerah sangat tinggi dengan nilai 84,36%, Besaran Desentralisasi Fiskal sebesar 6,24% dikategorikan sangat rendah. Efektivitas PAD sebesar 6,17% termasuk dalam ukuran tidak efektif. Efisiensi PAD pada kelompok sangat efisien dengan nilai 3,73%. Efektivitas Fiskal adalah 98,92% dalam ukuran yang cukup efektif. Efisiensi Fiskal Daerah dengan nilai 12,59% dapat dinyatakan efisien, Besaran kontribusi BUMD dengan nilai 5,04% tergolong rendah. Adapun penelitian ini adalah untuk pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan pemerintah daerah Langkat selama 8 tahun ini dilihat dari beberapa aspek.

Keyword: Analisis Informasi Finansial, Performa Finansial, Pemerintah Kabupaten.

ABSTRAK

This study aims to analyze the financial performance of local governments in terms of how many include: Regional Financial Autonomy Scale, Fiscal Decentralization Amount, PAD Effectiveness, PAD Efficiency, Regional Fiscal Effectiveness, Regional Fiscal Efficiency and BUMD Contribution Amount. This research is a quantitative descriptive study with the subject of research on regional financial information in Langkat Regency in 2013-2020, the data collection method used is the documentation method. The data analysis technique used is financial scale analysis. The results show that the Financial Autonomy Scale is still very low with an average value of 7.48%, Regional Financial Independence is very high with a value of 84.36%, the amount of Fiscal Decentralization of 6.24% is categorized as very low. PAD effectiveness of 6.17% is included in the ineffective measure. PAD efficiency in the group is very efficient with a value of 3.73%. Fiscal Effectiveness is 98.92% in a fairly effective measure. Regional Fiscal Efficiency with a value of 12.59% can be declared efficient. The amount of BUMD's contribution with a value of 5.04% is relatively low. This research is for the local government and the community in the development of the Langkat local government for the past 8 years seen from several aspects.

Keywords: Financial Information Analysis, Financial Performance, District Government

Naskah diterima: 24-07-2022, Naskah direvisi: 23-12-2022, Naskah dipublikasikan: 30-11-2022

PENDAHULUAN

Penyelenggara pusat telah mengeluarkan dua undang-undang (UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah, 2014) dan (UU RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Wilayah, 2004). Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 diinginkan Penyelenggara wilayah dapat menaikkan kebahagiaan dan kemakmuran warga melalui pembangunan infrastuktur dan layanan publik. Hal ini disebabkan telah terjadi desentralisasi sehingga menghasilkan kemudahan dalam pengendalian bagi penyelenggara dibandingkan dengan sentralisasi, pada saat sudah dilaksanakan UU nomor 23 Tahun 2014 maka Penyelenggara wilayah telah diserahkan tanggung jawab yang menekan lebih berperan aktif dalam mengurus sendiri program penyelenggaran wilayah (Dora dalam jurnal (Siswanto & Maylani, 2022)). Dengan adanya modifikasi sistem pemerintahan juga membawa modifikasi pada sistem hubungan finansial dalam perwujudan otonomi wilayah antara Penyelenggara pusat dan Penyelenggara wilayah yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Untuk mewujudkan penyelenggaran otonomi wilayah, maka penyelenggara wilayah diminta untuk melaksanakan program pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga dapat menaikkan peran serta warga dalam pembangunan infrastruktur, serta menaikkan kesetaraan dan keadilan dengan menumbuhkan semua kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Otonomi wilayah dapat diyakini sebagai konsep pembangunan dengan menyerahkan tanggung jawab secara luas bagi penyelenggara wilayah dari pusat untuk menaikkan PADnya. Desakan terhadap kenaikan PAD semakin baik seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan Penyelenggara pusat terhadap Penyelenggara wilayah. Jika dilihat dana perimbangan yang dicairkan dari Penyelenggara pusat ke Penyelenggara wilayah cukup besar tetapi diharapkan penyelenggara wilayah harus kreatif dalam mengalih sumber daya yang ada dalam wilayah tersebut untuk dapat menoptimal perolehan PAD. Oleh karena itu, penyelenggara wilayah diharapkan dapat mengalih yang dapat menaikkan PAD nya. Salah satu kesuksesan penyelenggara wilayah adalah ketika dapat mengelola finansial sesuai dengan regulasi yang sudah diterbitkan (Susilawati et al., 2018)

Pengendalian finansial wilayah berarti semua program-program seperti Persiapan, perwujudan, administrator, pemberitaan, reponsibility, dan pengawasan finansial wilayah. Aspek yang paling utama dalam pembangunan wilayah adalah adanya pengendalian finansial wilayah yang baik, adanya keterbukaan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang ada. Pengelolaan finansial wilayah harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar dapat mencapai good governance yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Kebebasan dalam melaksanakan belanja APBD-nya harus betul-betul yang tepat sasaran. Oleh sebab itu penyelenggara wilayah harus dapat mengoptimalkan sumber daya dalam menaikkan PADnya. Pada setiap akhir periode penyelenggara wilayah akan menyajikan informasi finansial sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Informasi finansial ini nantinya akan dapat digunakan untuk menganalisis nilai sumber daya ekonomi yang bisa digunakan untuk program pemerintahan, penilaian Keefektifan dan keefisienan suatu entitas peinformasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Informasi finansial yang akan dianalisis dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada yang membutuhkan mengenai bagaimana cara memahami informasi finansial tersebut, dan bagaimana dalam menafsirkan angka-angka yang terdapat dalam informasi finansial, bagaimana penilaian informasi finansial serta bagaimana pemakai informasi finansial dalam pengambilan putusan (Mahmudi, 2016). Pengukuran performa penyelenggara wilayah memiliki banyak tujuan, diantaranya yaitu untuk menaikkan performa dan menaikkan akuntabilitas penyelenggara wilayah. Akuntabilitas bukan hanya sekedar menyebutkan cara uang publik digunakan tetapi harus bisa mengungkapkan

apakah uang publik tersebut telah digunakan dengan tepat sasaran secara efektif dan efisien. Pengukuran performa finansial ini dapat dipakai dalam mengukur analisis skala finansial, balanced scorecard dan juga value for money (Munandar, 2017).

Adapun gambar dari riset ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Purbandari, 2019) yang mengungkapkan bahwa kemandirian daerah adalah rendah, begitu juga dengan yang dilakukan oleh (Zukhri, 2020) di Provinsi Bangka Belitung dimana kemandirian daerahnya rendah, tetapi dalam derajat ketergantungan daerah sangat tinggi, pada derajat desentralisasi fiskal masuk dalam kategori sedang, sedangkan menurut oleh (Harahap & Nasution, 2019) menyatakan bahwa kota Medan telah independen dan sangat efektif dalam kinerja finansial dalam menjalankan pemerintahan, begitu juga yang dilakukan oleh (Yakub et al., 2022) yang menyatakan bahwa pajak daerah tergolong sangat efektif dan sangat efisien, tetapi kurang efisien dalam pemungutan retribusi daerah karena targetnya tidak tercapai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Susanto, 2019) bahwa rasio efektifitas dikelompokkan dalam efektif, tetapi dalam rasio efisiensi sangat tidak efisien, dalam kemandirian juga masih rendah pada Kota Mataram.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sakinah & Satriawan, 2021) menyatakan bahwa dalam hal derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sedangkan untuk efektifitas dan efisiensi Kabupaten Madura cukup efektif dan efisien. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Fernando, 2017) rasio derajat desentralisasi berada dalam kategori sedang rasio ketergantungan sangat tinggi, pada rasio kemandirian tergolong rendah, untuk rasio efektifitas sangat efektif tetapi untuk rasio efisiensi sangat tidak efisien di Kabupaten Sleman. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Herdiyana & Andriana, 2020) yang menyatakan bahwa kelemahan daerah terdapat dalam pembelanjaan operasional, tetapi menurut (Karina & Noeryni, 2016) bahwa kinerja keuangan DKI Jakarta sudah baik dari segi rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi, sejalan juga dengan yang dilakukan oleh (Moridu, 2021) yang menyatakan bahwa efisiensi sangat efisien dan juga dari segi efektifitas rata-rata efektif di Kabupaten Banggai, menurut (Nalle et al., 2021) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal masuk dalam kategori sedang, tingkat ketergantungan sangat tinggi diikuti kemandirian keuangan sangat rendah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Analisis performa finansial wilayah dapat dipakai pemakai informasi finansial wilayah untuk memahami performa penyelenggara wilayah. Adapun analisis yang dipakai adalah skala finansial sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Kabupaten Langkat adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 23 Kecamatan, 37 keluarahan serta 277 desa. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan Kabupaten Langkat adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam mengalih potensi alam yang begitu luas dan subur, sehingga dapat menaikkan penghasilan asli daerah tersebut, tetapi kenyataan yang dihadapi sekarang ini pemerintahan daerah Kabupaten Langkat sangat mengharapkan bantuan dari pusat dalam menutupi biaya operasional dalam menyelenggarakan pemerintahan, bisa dikatakan pemerintah gagal melakukan pemekaran kabupaten karena kabupaten yang dimekarkan akan menambah belanja negara dalam mendanai operasional pemerintahan daerah yang dimekarkan.

Adapun kegunaan dari Riset ini adalah untuk memperkaya pengetahuan dan tindak lanjut oleh pengambilan keputusan melalui analisis perbandingan laporan finansial pemerintahan dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Langkat, sehingga kedepannya dapat diperbaiki untuk menaikkan kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Langkat dan juga sumber daya manusia yang dimilikinya.

KAJIAN LITERATUR

Skala Otonomi Finansial Wilayah

Skala otonomi finansial wilayah adalah skala yang dapat dipakai untuk mengevaluasi otonomi finansial penyelenggara wilayah dalam rangka membiayai pembangunan, layanan kepada warga, dan program pemerintahan lainnya. Skala Otonomi keuangan Wilayah dinampakkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan penghasilan wilayah yang berasal dari sumber lain atau penghasilan transfer. Semakin tinggi skala otonomi finansial wilayah berarti semakin tinggi pula otonomi finansial wilayah (Halim, 2012).

Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah

Skala Ketidakmandirian finansial wilayah dikalkulasi dengan cara membandingkan total penghasilan transfer yang diterima oleh pemasukan wilayah dengan total pemasukan wilayah Provinsi (Mahmudi, 2016) Semakin tinggi skala ini maka semakin besar tingkat Ketidakmandirian penyelenggara wilayah terhadap Penyelenggara pusat.

Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus

Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus merupakan tolok ukur kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan penyelenggara pusat kepada penyelenggara wilayah untuk mengelola dan memaksimalkan penghasilan. Ukuran desentralisasi merupakan salah satu skala finansial yang dapat dipakai untuk mengatakan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan penyelenggara pusat kepada penyelenggara wilayah dalam melaksanakan pembangunan. Skala ini mengatakan ukuran sumbangan PAD terhadap total pemasukan wilayah. Semakin tinggi sumbangan PAD maka semakin tinggi pula kemampuan penyelenggara wilayah dalam melaksanakan desentralisasi (Bisma & Susanto, 2010).

Skala Efektifitas Penghasilan Asli Wilayah

Skala Keefektifan mencerminkan kemampuan penyelenggara wilayah dalam mewujudkan penghasilan asli wilayah yang diprogramkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah. Skala Keefektifan dimaksudkan untuk membahas seberapa besar Keefektifan dari program finansial yang dilaksanakan penyelenggara wilayah. Skala Keefektifan PAD mengatakan kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016)

Skala Keefisienan Penghasilan Asli Wilayah

Skala Keefisienan PAD perlu dikalkulasi untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan penyelenggara wilayah dalam menyelenggarakan program untuk mendapatkan realisasi penghasilan. Skala ini dikalkulasi dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan penyelenggara wilayah untuk mendapatkan PAD dengan realisasi PAD (Mahmudi, 2016). Semakin kecil nilai skala ini maka semakin efisien performa penyelenggara wilayah dalam melakukan pengumpulan penghasilan asli wilayah (Halim, 2012)

Skala Efektifitas Fiskus wilayah

Keefektifan (hasil guna) adalah ukuran kesuksesan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Keefektifan merupakan perbandingan outcome dan output. Outcome merupakan dampak suatu program atau program terhadap warga sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan (Mahsun, 2019). Analisis efektifitas fiskus wilayah yaitu analisis yang mencerminkan kemampuan pemerintah wilayah dalam target/anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah (Halim, 2012).

Skala Keefisienan Fiskus wilayah

Keefisienan berhubungan dengan metode operasi, suatu program dapat dinyatakan efisien apabila suatu produk yang dihasilkan dengan memakai sumber daya dan dana serendah-rendah efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi biaya untuk mendapatkan pemasukan wilayah dan input merupakan realisasi dari pemasukan wilayah (Mahsun, 2019). Performa penyelenggara wilayah dalam melakukan pengumpulan fiskus wilayah diukurkan efisien apabila skala yang dicapai kurang dari 10% atau semakin kecil nilai skala maka semakin baik/efisien.

Skala Ukuran Sumbangan BUMD

BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 (UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah, 2014) dan Pasal 1 angka 1 (PP, 2017) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh wilayah. Skala ini berguna untuk mengetahui tingkat sumbangan perusahaan wilayah dalam mendukung penghasilan wilayah. Skala ini dikalkulasi dengan cara membandingkan pemasukan wilayah dari hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan dengan total pemasukan Penghasilan Asli Wilayah (Mahmudi, 2016).

METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam riset ini adalah menggunakan deskriptif kuantitatif dengan melihat laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK Sumatera utara selama tahun 2013-2020. Teknik pengumpulan data memakai Teknik dokumentasi. Langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan skala terhadap data finansial yang diperoleh. Kemudian data tersebut dianalisis sesuai teori dalam sumber dan dideskripsikan dengan memakai kalimat maupun gambar yang dapat memberikan penjelasan mengenai performa finansial (Taras & Artini, 2017) Analisis Informasi finansial dipakai dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam informasi finansial (Mahsun, 2019). Analisis performa finansial yang dilaksanakan pada riset ini dilaksanakan untuk menghasilkan informasi mengenai performa finansial penyelenggara wilayah Kabupaten Langkat sebagai bahan dalam pengambilan putusan dan penialain terhadap performa finansial penyelenggara wilayah dalam kurun waktu 2013-2020. Skala yang dipakai pada riset ini meliputi: Rasiko Otonomi Finansial, Wilayah, Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah, Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus, Skala Keefektifan PAD, Skala Keefisienan PAD, Skala Keefektifan Fiskus wilayah, Skala Keefisienan Fiskus wilayah, Skala Ukuran Sumbangan BUMD. Data yang dipakai dalam riset ini berupa Informasi Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2013-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skala Otonomi

Skala Otonomi ini untuk mengukur seberapa besar kontribusi realisasi total PAD dibandingkan dengan penghasilan transfer yang diperoleh oleh Kabupaten Langkat setiap tahunnya, jika rasionya semakin kecil berarti kontribusi realisasi total PAD sangat rendah terhadap penghasilan wilayah, ini berarti pemerintah Kabupaten Langkat selalu mengharapkan dari pusat untuk menutupin biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat. Dari hasil pengamatan selama tahun 2013-2020 didapat rasionya dibawah 25% artinya bahwa kemampuan finansial Kabupaten Langkat sangat rendah sekali dengan pola hubungan instruktif.

Tabel 1 : Skala Otonomi

Tahun	Realisasi Total Pad	Penghasilan Transfer	Skala	Kemampuan Finansial	Pola Hubungan
2013	65.521.499.189	1.419.706.153.815	4,62%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2014	107.811.975.547	1.540.371.084.996	7,00%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2015	122.715.359.908	1.804.265.890.307	6,80%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2016	132.673.213.412	1.885.124.794.037	7,04%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2017	139.717.647.855	1.871.062.152.590	7,47%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2018	136.680.578.541	1.806.703.118.972	7,57%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2019	167.523.076.879	1.868.438.425.165	8,97%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
2020	168.843.723.199	1.623.324.864.132	10,40%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
Rata-rata	130.185.884.316	1.727.374.560.502	7,48%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Langkat Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

INDIKATOR		
Otonomi(%)	Kemampuan Finansial	Pola Hubungan
0% - 25%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah Sekali	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Parsipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Semakin tinggi skala maka semakin tinggi otonomi wilayah tersebut. (Halim, 2012)

Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah

Skala Ketidakmandirian finansial wilayah dipakai untuk menganalisis seberapa besar ketidakmandirian finansial wilayah dengan membandingkan antara penghasilan transfer dengan penghasilan wilayah, jika rasionya besar, ini berarti pemerintahan Kabupaten Langkat sangat tergantung kepada pemerintah pusat untuk mendanai operasional penyelenggaraan pemerintahannya. Dari hasil pengamatan yang peneliti analisis selama tahun 2013-2022 cenderung mengalami fluktuasi namun tetap berada dikategori Tinggi.

Tabel 2 : Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah

Tahun	Penghasilan Transfer	Penghasilan Wilayah	Skala	Ketidakmandirian
2013	1.419.706.153.815	1.555.901.880.204	91,25%	Tinggi
2014	1.540.371.084.996	1.682.148.382.104	91,57%	Tinggi
2015	1.804.265.890.307	2.020.688.705.016	89,29%	Tinggi
2016	1.885.124.794.037	2.215.047.135.449	85,11%	Tinggi
2017	1.871.062.152.590	2.311.283.153.445	80,95%	Tinggi
2018	1.806.703.118.972	2.226.626.152.513	81,14%	Tinggi
2019	1.868.438.425.165	2.361.512.739.444	79,12%	Tinggi
2020	1.623.324.864.132	2.122.684.872.331	76,48%	Tinggi
Rata-rata	1.727.374.560.502	2.061.986.627.563	84,36%	Tinggi

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Langkat Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

INDIKATOR	
Ketidakmandirian(%)	Kemampuan Finansial
0% - 25%	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Semakin tinggi skala maka semakin tinggi Ketidakmandirian wilayah terhadap penyelenggara pusat. (Mahmudi, 2016).

Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus

Skala ini mengukur seberapa besar ukuran desentralisasi fiskus dalam menghasilkan penghasilan asli wilayah dengan mengukur penghasilan asli wilayah dengan penghasilan wilayah, semakin tinggi rasionya maka semakin optimal penyelenggaraan wilayah dalam memperoleh penghasilan asli wilayahnya tersebut (Mahmudi, 2016). Dari hasil pengamatan selama tahun 2013-2020 rasionya dikategorikan rendah sekali.

Tabel 3 : Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus

Tahun	Penghasilan Asli Wilayah	Penghasilan Wilayah	Skala	Indikator
2013	65.521.499.189	1.555.901.880.204	4,21%	Rendah Sekali
2014	107.811.975.547	1.682.148.382.104	6,41%	Rendah Sekali
2015	122.715.359.908	2.020.688.705.016	6,07%	Rendah Sekali
2016	132.673.213.412	2.215.047.135.449	5,99%	Rendah Sekali
2017	139.717.647.855	2.311.283.153.445	6,05%	Rendah Sekali
2018	136.680.578.541	2.226.626.152.513	6,14%	Rendah Sekali
2019	167.523.076.879	2.361.512.739.444	7,09%	Rendah Sekali
2020	168.843.723.199	2.122.684.872.331	7,95%	Rendah Sekali
Rata-rata	130.185.884.316	2.061.986.627.563	6,24%	Rendah Sekali

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Langkat Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

INDIKATOR	
Skala	Keterangan
0 - 10%	Rendah Sekali
10 - 30%	Rendah
31 - 40%	Cukup
41 - 50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Semakin tinggi sumbangan PAD maka semakin tinggi pula kemampuan penyelenggara wilayah dalam melaksanakan desentralisasi (Bisma & Susanto, 2010).

Skala Keefektifan PAD

Skala Keefektifan PAD mencerminkan kemampuan penyelenggara wilayah dalam mewujudkan penghasilan asli wilayah yang diprogramkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah. Skala Keefektifan PAD mengatakan kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016). Hasil riset mengatakan bahwa nilai skala Keefektifan PAD Kabupaten Langkat tahun 2013-2020 cukup fluktuatif. Nilai Skala Keefektifan PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,14% dan nilai skala terendah pada tahun 2013 sebesar 4,09%. Rata-rata nilai skala Keefektifan PAD Kabupaten Langkat masuk dalam ukuran cukup efektif.

Tabel 4: Skala Keefektifan PAD

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran Pad	Skala	Kemampuan Finansial
2013	65.521.499.189	1.603.656.988.480	4,09%	Tidak efektif
2014	107.811.975.547	1.623.707.886.136	6,64%	Tidak efektif
2015	122.715.359.908	2.017.699.111.462	6,08%	Tidak efektif
2016	132.673.213.412	2.336.327.100.862	5,68%	Tidak efektif
2017	139.717.647.855	2.348.070.654.167	5,95%	Tidak efektif
2018	136.680.578.541	2.264.130.572.078	6,04%	Tidak efektif
2019	167.523.076.879	2.351.829.208.710	7,12%	Tidak efektif
2020	168.843.723.199	2.180.786.190.792	7,74%	Tidak efektif
Rata-rata	130.185.884.316	2.090.775.964.086	6,17%	Tidak efektif

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Langkat Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

INDIKATOR	
Skala Efektifitas (%)	Kemampuan Finansial
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Semakin tinggi skala maka semakin tinggi kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)

Skala Keefisienan PAD

Skala Keefisienan PAD ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien penyelenggara pemerintah dalam melakukan pemungutan biaya perolehan PAD dibandingkan dengan realisasi PAD yang diperoleh pada periode tersebut, semakin kecil rasionya maka semakin efisien penyelenggaraan pemerintah dalam melakukan pembiayaan perolehan PAD. Dari hasil pengamatan menyatakan bahwa keefisienan PAD selama tahun 2013-2020 cukup fluktuatif dengan adanya kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, dimana skala keefisienan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 11,77% sedangkan terendahnya terdapat di tahun 2017 sebesar 1,66%. Tetapi semuanya masih dalam kategori efisien dan sangat efisien.

Tabel 5: Perhitungan Skala Keefisienan PAD

Tahun	Biaya perolehan	Realiasi PAD	Skala	kemampuan Finansial
2013	7.708.969.815	65.521.499.189	11,77%	efisien
2014	5.051.488.896	107.811.975.547	4,69%	sangat efisien
2015	5.236.785.955	122.715.359.908	4,27%	sangat efisien
2016	2.292.219.124	132.673.213.412	1,73%	sangat efisien
2017	2.318.986.459	139.717.647.855	1,66%	sangat efisien
2018	2.653.435.948	136.680.578.541	1,94%	sangat efisien
2019	3.253.634.948	167.523.076.879	1,94%	sangat efisien
2020	3.094.199.465,00	168.843.723.199	1,83%	sangat efisien
total rata rata	3.951.215.076	130.185.884.316	3,73%	sangat efisien

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Langkat Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

INDIKATOR	
Keefisienan (%)	Kemampuan Finansial
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Semakin tinggi skala maka semakin tinggi kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)

Skala Keefektifan Fiskus wilayah

Analisis efektifitas fiskus wilayah yaitu menganalisis kemampuan pemerintah wilayah dalam mendapatkan penghasilan asli wilayah dengan cara membandingkan realisasi fiskus wilayah dengan anggaran fiskus wilayah (Halim, 2012). Hasil riset mengatakan kalau nilai Keefektifan fiskus wilayah Kabupaten Langkat tahun 2013-2020 cukup fluktuatif dengan adanya beberapa kenaikan dan pengurangan setiap tahun. Nilai Keefektifan fiskus wilayah paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 112,55% atau mengalami kenaikan sebesar 9,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara nilai terendah terjadi di tahun 2020 sebesar 89,90%.

Tabel 6: Skala Keefektifan Fiskus wilayah

Tahun	Realisasi Fiskus Wilayah	Anggaran Fiskus Wilayah	Skala	Kemampuan Finansial
2013	27.682.021.547	28.143.300.000	98,36%	Cukup Efektif
2014	37.150.151.469	38.547.000.000	96,38%	Cukup Efektif
2015	42.304.284.902	42.120.000.000	100,44%	Sangat Efektif
2016	46.948.822.153	45.973.000.000	102,12%	Sangat Efektif
2017	50.658.000.000	56.895.356.836	89,04%	Kurang Efektif
2018	59.765.187.014	58.260.000.000	102,58%	Sangat Efektif
2019	76.128.182.957	67.642.000.000	112,55%	Sangat Efektif
2020	71.908.157.019	79.986.254.380	89,90%	Kurang Efektif
total rata rata	51.568.100.883	52.195.863.902	98,92%	Cukup Efektif

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Langkat Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

INDIKATOR	
Skala Efektifitas (%)	Kemampuan Finansial
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Semakin tinggi skala maka semakin tinggi kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)

Skala Keefisienan Fiskus wilayah

Performa penyelenggara wilayah dalam melakukan pengumpulan fiskus wilayah diukurkan efisien apabila skala yang dicapai kurang dari 10% atau semakin kecil nilai skala maka semakin baik atau efisien. Hasil riset mengatakan bahwa nilai skala keefisienan fiskus wilayah Kabupaten Langkat tahun 2013-2020 cukup fluktuatif dengan adanya beberapa kenaikan dan pengurangan setiap tahunnya. Nilai Skala keefisienan fiskus wilayah paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 22,60% atau mencerminkan tingkat keefisienan yang cukup rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai skala keefisienan fiskus wilayah terendah pada tahun 2016-2020 sebesar 0% atau tidak memiliki tingkat keefisienan. Meskipun nilai skala keefisienan fiskus wilayah selalu menemui kenaikan, akan tetapi tingkat keefisienan fiskus wilayah Kabupaten Langkat masuk dalam ukuran sangat efisien.

Tabel 7: Skala Keefisienan Fiskus wilayah

Tahun	Biaya Pengumpulan Fiskus	Realisasi Fiskus Wilayah	Skala	Kemampuan Wilayah
2013	6.254.923.196	27.682.021.547	22,60%	Cukup Efisien
2014	3.000.000.000	37.150.151.469	8,08%	Sangat Efisien
2015	3.000.000.000	42.304.284.902	7,09%	Sangat Efisien
2016	-	46.948.822.153	-	-
2017	-	50.658.000.000	-	-
2018	-	59.765.187.014	-	-
2019	-	76.128.182.957	-	-
2020	-	71.908.157.019	-	-
total rata rata	4.084.974.399	51.568.100.883	12,59%	Efisien

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

INDIKATOR	
Keefisienan (%)	Kemampuan Finansial
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Performa penyelenggara wilayah otonom jika kurang dari 10% atau semakin kecil maka dapat dinyatakan semakin baik/efisien. (Mahsun, 2019)

Skala Ukuran Sumbangan BUMD

Skala ini berguna untuk mengevaluasi sebesar besar laba BUMD dapat berkontribusi terhadap penghasilan wilayah Kabupaten Langkat dengan cara membandingkan laba BUMD dengan Realisasi PAD (Mahmudi, 2016). Hasil riset mengatakan bahwa nilai ukuran sumbangan BUMD Kabupaten Langkat tahun 2013-2020 cenderung fluktuatif. Skala ukuran yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,08% dan paling rendah pada tahun 2014 sebesar 3,15%.

Tabel 8: Skala Ukuran Sumbangan BUMD

Tahun	Laba BUMD	Realisasi PAD	Skala
2013	4.637.997.487	65.521.499.189	7,08%
2014	3.398.214.567	107.811.975.547	3,15%
2015	5.745.433.350	122.715.359.908	4,68%
2016	7.996.061.801	132.673.213.412	6,03%
2017	6.953.913.846	139.717.647.855	4,98%
2018	7.421.389.631	136.680.578.541	5,43%
2019	6.307.629.896	167.523.076.879	3,77%
2020	8.730.147.444	168.843.723.199	5,17%
total rata rata	6.398.848.503	130.185.884.316	5,04%

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Langkat Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

PEMBAHASAN

Skala Otonomi Kabupaten Langkat untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 7,48% memiliki kemampuan finansial yang rendah sekali dengan pola hubungan yang instruktif. Dimana kemampuan Kabupaten Langkat dalam rangka membiayai pembangunan, layanan dan program pemerintahan masih sangat rendah sekali. Skala Ketidakmandirian Finansial Kabupaten Langkat untuk tahun 2013-2020 dengan rata-rata skala 84,36% memiliki tingkat Ketidakmandirian yang tinggi. Dimana Ketidakmandirian Kabupaten Langkat terhadap Penyelenggara pusat ialah tinggi. Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus Kabupaten Langkat untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 6,24% memiliki tingkat sumbangan yang rendah sekali. Dimana kemampuan Kabupaten Langkat dalam mengelola dan memaksimalkan penghasilan masih rendah sekali.

Skala Keefektifan PAD Kabupaten Langkat untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 6,17% memiliki kemampuan yang Tidak efektif. Dimana kemampuan Kabupaten Langkat dalam mewujudkan Penghasilan Asli Wilayah yang diprogramkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah. Skala Keefisienan PAD Kabupaten Langkat untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 3,73% memiliki tingkat keefisienan yang sangat efisien. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa performa Kabupaten Langkat dalam melakukan pengumpulan PAD sangat efisien. Skala Keefektifan Fiskus wilayah Kabupaten Langkat untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 98,92% .

Skala Keefisienan Fiskus wilayah Kabupaten Langkat untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 12,59% memiliki tingkat keefisienan yang efisien. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa performa Kabupaten Langkat dalam melakukan pengumpulan Fiskus wilayah sangat efisien. Skala Ukuran Sumbangan BUMD Kabupaten Langkat untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 5,04%. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat sumbangan perusahaan wilayah terhadap penghasilan pemerintah Kabupaten Dairi cukup tinggi.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil riset diatas maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa rata-rata skala pengukuran finansial di Kabupaten Langkat selama tahun 2013-2020 mulai dari skala otonomi daerah sebesar 7,48% dalam kategori sangat rendah sekali dengan pola instruktif, skala ketidakmandirian sebesar 84,36% masuk kelompok tinggi, skala ukuran desentralisasi fiskus sebesar 6,24% dalam kategori rendah sekali, skala keefektifan PAD 6,17% dalam kategori Tidak efektif, skala keefisienan PAD sebesar 3,73% dalam kategori sangat efisien, skala keefektifan fiskus wilayah sebesar 98,92% cukup efektif, skala keefisienan fiskus wilayah sebesar 12,59% masuk kategori efisien dan skala ukuran sumbangan BUMD sebesar 5,04% masuk kategori rendah.

Saran

Penyelenggara wilayah adalah agar dapat memaksimalkan pemasukan dari wilayah masing-masing agar dapat mempercepat penyusunan PERDA dan mengubah tarif retribusi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penyelenggara Kabupaten Langkat hendaknya mengoptimalkan penghasilan asli dari wilayahnya tersebut dan juga mendukung pelaku UMKM yang dapat menambah penghasilan asli dari wilayah Kabupaten Langkat, terlebih masih banyaknya sumber daya alam yang menganggur yang belum dapat dioptimalkan oleh pemerintahan daerah. Begitu juga kepada penyelenggara wilayah Kabupaten Langkat harus betul-betul membelanjakan sesuai dengan yang sudah dianggarkan secara efisien dan efektif serta melakukan pencatatan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, dan yang terakhir penyelenggara pemerintahan hendaknya melakukan sosialisasi melalui media massa ataupun

media elektronik akan pentingnya melakukan pembayaran pajak dan mempermudah dalam pengurusan izin usaha dan memberikan penyuluhan bagaimana cara pembayaran pajak dengan mudah dan efektif, sehingga dengan adanya kemudahan-kemudahan ini maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak sehingga dapat menaikkan penghasilan asli daerah. Begitu juga dengan BUMD yang terdapat di wilayah penyelenggara Langkat agar dapat lebih optimal dalam pencapaian keuntungan BUMD yang dimiliki, sehingga juga dapat menghasilkan kenaikan pendapatan asli daerah tersebut.

REFERENSI

- Bisma, & Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75–86.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.)*. Penerbit Salemba Empat.
- Harahap, P. R., & Nasution, M. D. (2019). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 9–14.
- Herdiana, D., & Andriana, N. (2020). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Owner*, 4(1), 191–203.
<https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222>
- Karina, A., & Noeryni, D. (2016). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 1–22.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik 1-9*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019.
- Moridu, I. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 08(02), 90–97.
[file:///C:/Users/user/Downloads/1643-Article Text-3266-1-10-20210807 \(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1643-Article Text-3266-1-10-20210807 (2).pdf)
- Munandar, A. (2017). Dampak Akurasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kepatuhan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung. *Tesis*.
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Inovasi*, 17(1), 184–197.
[https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf](https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle%20et%20al.%20-%202021%20-%20Analisis%20kemampuan%20keuangan%20daerah%20dalam%20rangka%20pe.pdf)
- PP. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah*.
<http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e81db95b48b810c0bd303833303537>

- Purbandari, T. (2019). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan untuk Mewujudkan Efisiensi Anggaran (Studi pada Kabupaten Madiun). *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah*, 1(1), 15–33.
<https://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/view/14%0Ahttps://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/download/14/15>
- Sakinah, L., & Satriawan, B. (2021). Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Empat Kabupaten Di Madura 2015-2019. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(2), 249–271.
- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1515–1534.
- Siswanto, & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92.
<https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360–2387.
- UU. (2004). *UU RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- UU. (2014). *UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
<https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789>
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>